

Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pemberian Insentif pada Imam Masjid dan Guru Mengaji di Kabupaten Enrekang

Noor Azisah¹, Agus², Hariyanti Hamid³, Muhammad Iqbal⁴

^{1,2,3,4}Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia

Noorazisah12@gmail.com¹, aguslatimong@gmail.com², tanti.stisip@yahoo.co.id³

Abstrak Masalah yang terjadi yaitu proses pembayaran insentif melalui Bagian Adm. Kesra masih ada keluhan dari beberapa imam masjid dan guru mengaji diantaranya tidak validnya data penerima penerima insentif imam masjid dan guru mengaji karena masih banyak komplain dari imam masjid dan guru mengaji yang belum menerima insentif sedangkan keadaan yang ada bahwa anggaran yang diperuntukkan untuk membayar dana insentif tersebut dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang yang ada diatas pemerintah Kabupaten memberikan tunjangan kepada guru mengaji pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pemeberian insentif pada imam masjid dan guru mengaji di Kabupaten, untuk mengetahui faktor imam masjid dan guru mengaji di Kabupaten Enrekang. Lokasi penelitian di Kabupaten Enrekang khususnya bagian kesejahteraan rakyat. Dan tehnik pengumpulan datanya meliputi sumber pokok dan sumber lain. Teknik analisis datanya yaitu deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan aplikasi SPSS. Menunjukkan hasil bahwa kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemberian insentif, dengan melihat persentase sebesar 66,9% dan termasuk dalam kriteria baik. Dan berbagai faktor yang menimbulkan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah terhadap pemberian insentif imam masjid dan guru mengaji mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberian insentif pada imam masjid dan guru mengaji, dengan melihat persentase sebesar 73,1% dan artinya baik. Dan faktor yang dominan memberi pengaruh pada riset memang adalah faktor proses pencapaian yang diterapkan pemerintah kabupaten dalam hal ini kepala bagian kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci — Kebijakan dan Pemberian Insentif.

I. PENDAHULUAN

Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya sebagai obyek pelayanan yang juga merupakan

penentu keberhasilan dalam berbagai program pembangunan daerah dan bahkan nasional. Dalam konteks Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat dan

mempermudah akses pelayanan terhadap semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini terutama pada kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan dan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan langsung masyarakat lebih memungkinkan terjadi disetiap pemerintahan yang berotonomi.

Berdasarkan visi misi yang terdapat dalam ara pembangunan Kabupaten Enrekang yang salah satunya adalah mewujudkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang religius dan berbudaya, menjadi bagian dari program pemerintah dalam bidang keagamaan dalam mewujudkan taraf kehidupan bagi pelaku imam mesjid dan guru mengaji adalah dengan pemberian insentif melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Enrekang.

Hal tersebut dapat mewujudkan harapan bagi imam mesjid dan guru mengaji sebagai upaya pengembangan kehidupan keagamaan dan memperlancar pelaksanaan ibadah shalat dan ibadah lainnya, pembinaan imam mesjid dan guru mengaji membekali anak-anak dibidang pendidikan agama, maka sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

terhadap pengembangan agama maka dikeluarkanlah Peraturan Bupati Tentang Pemberian Dana Bantaun Sosial dan Dana Hibah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian insentif/bantuan keuangan imam mesjid dan guru mengaji.

Imam mesjid dan guru mengaji merupakan dakwah yang suci dan pemgemban amanah ini mendapat kedudukan terhormat baik di mata masyarakat maupun di hadapan Allah. Kedudukan tersebut dianggap sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai yang termaktub dalam kitab suci ajaran Muhammad saw. DanSebagai masyarakat religius tentunya amanah ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan dalam pelaksanaannya jauh dari keterpaksaan. imam mesjid dan guru mengaji melaksanakan dengan penuh tanggungjawab, kalaupun ada imbalan dari pemerintah tentulah hanya sebagai keutamaan.

Kompetensi imam mesjid dan guru mengaji menjadi kebutuhan yang mendesak dan untuk itulah perlu segera dilaksanakan Program Peningkatan Kompetensi Guru mengaji dan imam masjid.

Kondisi demikian bukan berarti guru mengaji dan imam masjid telah mengabaikan akan tugasnya namun lebih pada upaya

menjaga 'stabilitas' antara tugas dan tuntutan. Upaya menjaga 'stabilitas' dalam hal ini dilakukan berdasarkan asumsi berikut : Pertama, watak dan mental guru mengaji dan imam masjid yang terbiasa mandiri dan mengedepankan nilai-nilai zuhud dan ikhlas tanpa meminta bayaran dari apa yang diajarkannya. Kedua, keadaan ekonomi sebagian besar guru mengaji dan imam masjid yang masih minus dan belum mapan. Ketiga, sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang ikut andil dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus penjaga sistem nilai peradaban, pemerintah kurang akomodatif dalam menyerap realitas keberadaan guru mengaji dan imam masjid.

Beberapa pemikiran mengenai guru mengaji dan imam masjid sebagai bahan renungan dan i'tibar kepada semua pihak dan elemen masyarakat bahwa kepedulian dan penghargaan bagi orang yang berjasa dalam menverdasakan kehidupang bangsa.

Bentuk perhatian dan penghargaan pada guru mengaji dan imam masjid tidak sederhana berupa materi dan gelimang fasilitas semata namun nyata yang bersifat immateri Pemberian insentif di Kabupaten Enrekang ini sudah berjalan selama 4 tahun sejak tahun 2013 ketika menjelang Pemilihan Umum

Kepala Daerah, sehingga ada anggapan masyarakat bahwa pemberian insentif diberikan kepada guru mengaji dan imam masjid bukan untuk meringankan beban dan meningkatkan kesejahteraan para guru mengaji dan imam masjid serta perhatian pemerintah terhadap pembinaan masyarakat di bidang keagamaan, akan tetapi untuk tujuan politik.

Pada tahun 2016 Pemberian insentif terhadap guru mengaji dan imam masjid berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang nomor 329/KEP/VI/2016 tentang pemberian tunjangan kepada imam masjid di Kabupaten Enrekang tahun 2016 dan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 330/KEP/VI/2016 tentang pemberian tunjangan kepada pembina taman pengajian Al-Qur"an di Kabupaten Enrekang tahun 2016. Adapun jumlah penerima insentif dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Dalam proses pembayaran insentif melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdapat keluhan dari beberapa guru mengaji dan imam masjid diantaranya tidak sinkronnyaa data penerima insentif anantara guru mengaji dan imam karena masih banyak masalah dari guru mengaji dan imam masjid yang belum menerima insentif

Berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Enrekang yang ada diatas pemerintah Kabupaten memberikan tunjangan kepada guru mengaji pada tahun 2013 sebesar Rp. 50.000/bulan , tahun 2014 sebesar Rp. 85.000/bulan dan pada tahun 2015 s/d 2016 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp. 200.000/bulan yang dibayarkan selama 12 bulan. Begitu pula dengan insentif Imam Masjid pada tahun 2013 sebesar Rp. 100.000/bulan, tahun 2014 sebesar Rp. 120.000/bulan dan pada tahun 2015 s/d 2016 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp. 200.000/bulan yang dibayarkan selama 12 bulan, pembayaran insentif dibayarkan langsung melalui Bagian Kesra yang dianggarkan melalui DPA Sekretariat Daerah setiap tahun berjalan.

Dari Uraian diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Insentif Pada Imam Masjid dan Guru Mengaji di Kabupaten Enrekang “. Dengan tujuan Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pemeberian insentif pada imam masjid dan guru mengaji di Kabupaten Enrekang dan Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah terhadap

pemberian insentif pada guru mengaji dan imam masjid di Kabupaten Enrekang.

Implementasi merupakan langkah yang penting dalam proses kebijakan, banyak kebijakan yang baik yang mampu di buat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak di laksanakan. Sejalan menurut Huntington dalam Dedy Mulyadi (2015; 24)

Kemampuan itu dapat dilihat dari kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan oleh sebuah polibiro, cabinet/presiden negara itu. Pada dasarnya semua kebijakan berarti suatu keputusan ditetapkan oleh birokrasi/pemerintah yang akan di laksanakan oleh individu-individu/organisasi untuk mencapai suatu tujuan dari ketetapan yang .

Grindle dalam Dedy Mulyadi (2015;66) Keberhasilan Impementasi kebijakan di pengaruhi oleh isi kebijakan. Keberhasilannya di tentukan oleh implementability kebijakan tersebut.

Sebagaimana berbagai kegagalan implementasi kebijakan menimbulkan keperhatinan para ahli yang menawarkan konsep tentang bagaimana mengukur kebijakan yang baik dan bagaimana cara mengimplementasikan sebuah

kebijakan. Pada dasarnya ada beberapa ketepatan yang perlu dipahami dalam hal keefektifan implementasi suatu kebijakan, sehingga kita dapat menilai nantinya apakah kebijakan tersebut sudah tepat dan efektif, dalam mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut sudah tepat dan efektif untuk implementasi kebijakan dapat kita lihat pendapat Lester Dan Stewart dalam Riant Nugroho (2011: 650). Kelima ketepatan itu adalah ketepatan kebijakan, pelaksana, target, lingkungan dan ketetapan proses.

Pada ketepatan ini dilihat aktor-aktor pelaksanaan implementasi. Ketepatan Target dalam hal ini berkenaan dalam tiga hal yaitu apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi/tidak.

Kesiapan bukan saja dalam arti alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya..

Ketepatan Lingkungan yang mempengaruhi yaitu

lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal. Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal kebijakan yang disebut *calista* variabel eksogen, yang terdiri atas opini, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions*, yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dan *individuals* yakni individu-individu tertentu yang memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Ketepatan Proses, implementasi kebijakan publik dibagi menjadi tiga proses, yaitu: *Penerimaan kebijakan*, disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disini lain pemerintah memahami kebijakan tugas yang harus dilaksanakan.

Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil. Tahap menghasilkan output dan outcome seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan output dan outcome

es yang ditetapkan, maka kebijakan public perlu untuk di implementasikan tanpa di implementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji dalam Agustino (2006) yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan.

Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu : Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.

Istilah sistem insentif pada umumnya digunakan untuk menggambarkan rencana pembayaran upah yang dikaitkan secara langsung ataupun tidak langsung dengan berbagai standar kinerja pegawai. Insentif dapat dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai kepada pegawai yang prestasinya melebihi standar yang telah ditetapkan.

Prestasi yang meningkat akan menunjang pendapatan naik, maka dengan terpenuhinya kebutuhan maka ketenangan akan dapat dirasakan. Lingkungan kerja yang baik. Pemberian insentif dilakukan dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang baik sehingga dapat diberikan pula penghargaan kepada pegawai yang menghasilkan prestasi yang tinggi. Sedangkan peran guru mengaji ditengah-tengah masyarakat menandakan kebutuhan akan guru mengaji adalah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri.

Dibandingkan apabila orang tua yang hanya menitipkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah formal yang hanya menyediakan porsi pendidikan budi pekerti dan agama sangat terbatas. Maka wajar jika masih ada orang tua yang merasa khawatir akan nasib 'pola perilaku' si anak di kemudian hari. Artinya disadari atau tidak, terbukti bahwa guru mengaji hingga saat ini merupakan variable penting dalam meminimalisir dampak-dampak negatif dari arus informasi dan globalisasi. Minimal sebagai penjaga 'system nilai' dilingkungan masing-masing.

II. METODE PENELITIAN

Tipe pendekatan ini menggunakan tipe deskriptif kuantitatif dengan metode ini dapat memberikan secara cermat

dan jelas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah imam masjid sebanyak 614 dan guru mengaji sebanyak 898 orang, jadi teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan teknik penarikan sampel menggunakan rumus Yamane dengan tingkat kesalahan 10%, jadi jumlah sampel sebanyak 94 orang.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuisioner, dan data yang bersumber dari instansi pemerintahan, dengan teknik analisis data dianalisis dengan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan model regresi linear berganda.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian dan pengujian yang telah diuraikan, maka diperoleh data bahwa kebijakan pemerintah daerah terhadap pemberian insentif pada imam masjid dan guru mengaji sebagai berikut: Kebijakan pemerintah terhadap pemberian insentif pada imam masjid dan guru mengaji.

Berdasarkan hasil uji statistik melalui SPSS diperoleh data bahwa, kebijakan pemerintah daerah terhadap pemberian insentif pada imam masjid dan guru mengaji di Kabupaten Enrekang dengan nilai t hitung variabel kebijakan sebesar 13.639

dengan tingkat signifikan 0.000 ($p < 0,05$), berarti ada pengaruh yang signifikan antara kebijakan pemerintah terhadap pemberian insentif pada imam masjid dan guru mengaji, dan hasil model summary pengaruh X terhadap Y sebesar 66,9%, masuk dalam kategori baik.

Meskipun dalam hal ini masuk dalam kategori baik dengan persentase sebesar 66,9%, tetapi harapan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam hal pembuatan kebijakan pemberian insentif pada imam masjid dan guru mengaji masih belum optimal. Untuk itu pemerintah daerah harus lebih memperhatikan kebijakan dan menerapkannya, adapun kebijakan tersebut meliputi ; 1) ketetapan kebijakan, 2) ketetapan pelaksanaan,3) ketetapan target, 4) ketetapan lingkungan. 5) ketetapan proses.

Selanjutnya, diantara kelima indikator kebijakan pemerintah tersebut, yang paling besar pengaruhnya adalah ketetapan kebijakan sebesar 88%, ini berarti ketetapan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam pemberian insentif pada imam masjid dan guru mengaji, olehnya karena itu memang imam masjid dan guru mengaji harus diperhatikan juga oleh pemerintah daerah. Selanjutnya indikator yang kurang berpengaruh adalah indikator

ketetapan proses sebesar 73%.

Tetapi bukan berarti bahwa pemerintah harus memperhatikan apa yang telah ditetapkan dalam kebijakan tetapi dalam hal ketetapan prosesnya juga harus dilaksanakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan. Berdasarkan hasil uji statistik melalui SPSS diperoleh data bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah terhadap pemberian insentif pada imam masjid dan guru mengaji di Kabupaten Enrekang dengan nilai t hitung variabel kebijakan sebesar 15.803 dengan tingkat signifikan 0.000 ($p < 0,05$), berarti ada pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap pemberian insentif pada imam masjid dan guru mengaji, dan hasil model summary sebesar 73,1%, masuk dalam kategori baik.

Selanjutnya, diantara sembilan indikator faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah tersebut, yang paling besar pengaruhnya adalah faktor program pemberian insentif sebesar 78%, ini berarti faktor yang mempengaruhi program pemberian insentif yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam pemberian insentif pada imam masjid dan guru mengaji. Selanjutnya indikator

yang kurang berpengaruh adalah indikator proses pencapaian yang dilakukan pemerintah sebesar 72%.

Ini membuktikan bahwa dalam pencapaian pemberian insentif pada imam masjid dan guru mengaji belum terlaksana dengan optimal, sehingga banyak masyarakat, imam masjid dan guru mengaji mengeluh terhadap pemerintah daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai bahwa Kebijakan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberian insentif pada imam masjid dan guru mengaji di Kabupaten Enrekang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah terhadap pemberian insentif pada imam masjid dan guru mengaji pengaruh yang signifikan terhadap pemberian insentif pada imam masjid dan guru mengaji di Kabupaten

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Wahab, 2008, *pengantar analisis kebijakan publik*, universitas muhammadiyah malang press. Malang.
- [2] Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian*

- Administrasi Publik*. Cet. I Gava Media. Yogyakarta.
- [3] Budi Winarno, 2008, *kebijakan publik*, Medpress, yogyakarta.
- [4] Deddy Mulyadi. 2015, *Studi kebijakan dan pelayan publik*, alfabeta. Bandung.
- [5] Delly Mustafa, 2013, *birokrasi pemerintahan*, Alfabeta, Bandung.
- [6] Handoko T. Hani, 2002, manajemen personalia dan sumber daya manusia, BPF, Yogyakarta.
- [7] Hasibuan Malayu, 2001, manajemen sumber daya manusia pengertian dasar, pengertian, dan masalah., PT. Toko Agung, Jakarta.
- [8] Leo Agustino, *politik dan kebijakan publik*, AIPI, Bandung.
- [9] Mangkunegara Prabu, 2002, *manajemen sumber daya Manusia perusahaan*, Remaja Rosda Karya, Jakarta.
- [10] Riant Nugroho, 2014, *kebijakan publik. Di Negara-negara Berkembang*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- [11] Rivai Veithzal, 2004, *manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- [12] Subarsono, AG. 2005 *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- [13] Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta, Bandung.
- [14] _____. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- [15] Sumaryadi I. Nyoman, 2010, *efektivitas implementasi kebijakan*, Citra Utama, Jakarta.
- [16] Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset. Jakarta.
- [17] <http://devamatahari.blogspot.co.id/2012/04/tugas-imam-masjid.html>